

Jakarta, 12 Januari 2022

Perihal : Undangan Narasumber Diskusi Publik
Lampiran : Kerangka Acuan Kegiatan

Yth.

Dr. Haris Retno
Di Tempat

Dengan hormat,

Pertama-tama, semoga Ibu Dr. Haris Retno beserta keluarga dalam keadaan sehat dan tercukupi segala sesuatu. Perkenalkan kami dari Gerakan #BersihkanIndonesia, sebuah Gerakan yang didukung oleh lebih dari 45 lembaga di Indonesia yang bersatu untuk melawan polusi dan korupsi, mempercepat transisi energi di Indonesia menuju energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan, meninggalkan energi kotor batubara dan fosil lainnya.

Di awal tahun 2022 ini, publik disajikan drama stop export batubara dan pencabutan ribuan izin pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Drama stop export yang mungkin berakhir dini tersebut setidaknya telah berujung pada penghapusan patokan harga DMO, sementara daftar pencabutan ribuan izin tak juga kunjung diumumkan.

Sementara itu, setidaknya dua pertambangan besar PKP2B telah habis atau akan segera habis di tahun 2022 ini, salah satunya yaitu PT Kaltim Prima Coal yang telah habis pada 31 Desember 2021 dan secara janggal diperpanjang hingga 14 Januari 2022. PT. KPC dikenal telah dan masih memberikan dampak buruk baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar tambang, selain tentu terus berkontribusi terhadap memburuknya perubahan iklim. Evaluasi terhadap KPC tidak terbuka untuk publik.

Menyoroti hal-hal tersebut, kami berniat mengadakan sebuah diskusi publik yang juga mengundang para jurnalis, dan kami mengundang Ibu Dr. Haris Retno untuk menjadi narasumber dalam diskusi publik tersebut. Diskusi publik akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022
Waktu : 10:00 WIB – 11:30 WIB
Tempat : Zoom, dan akan disiarkan di social media #BersihkanIndonesia dan jejaring.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kami sangat berharap Ibu Dr. Haris Retno dapat berhadir dan berbagi pandangan.

Salam Hormat,

#BersihkanIndonesia



Kerangka Acuan Kegiatan Diskusi Publik

Drama Stop Export dan Cabut Izin Pertambangan: Pertambangan Besar Termasuk?

Di awal tahun 2022 ini, publik disajikan drama stop export batubara dan pencabutan ribuan izin pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Drama stop export yang mungkin berakhir dini tersebut setidaknya telah berujung pada penghapusan patokan harga DMO, sementara daftar pencabutan ribuan izin tak juga kunjung diumumkan. Presiden Jokowi mengatakan kriteria dibalik pencabutan tersebut: Izin-izin yang tidak dijalankan; yang tidak produktif; yang dialihkan ke pihak lain; serta yang tidak sesuai dengan peruntukkan dan peraturan. Kedua manuver tersebut - stop export batubara dan pencabutan ribuan izin pertambangan - diawali dengan menipisnya stok dalam negeri batubara, dan oleh karena itu ancaman pemadaman bergilir bagi para pelanggan PLN.

Sementara itu, setidaknya dua pertambangan besar PKP2B telah habis atau akan segera habis di tahun 2022 ini, yaitu PT Kaltim Prima Coal yang telah habis pada 31 Desember 2021 dan secara janggal diperpanjang hingga 14 Januari 2022, dan PT. Adaro Indonesia yang akan habis pada 1 Oktober 2022. Keduanya dikenal telah dan masih memberikan dampak buruk baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar tambang, selain tentu terus berkontribusi terhadap memburuknya perubahan iklim. Beberapa yang lain dijadwalkan habis pada 2023 dan 2025. Evaluasi terhadap mereka tidak terbuka untuk publik. Sementara itu, tekanan publik global agar pendanaan bagi korporasi tambang batubara segera diakhiri, juga semakin menguat.

Publik menanggapi kedua manuver tersebut secara beragam, bahwa penyetopan export atau kemudian penghapusan patokan harga DMO tidak akan menjadi solusi jangka panjang bagi krisis pasokan yang terus berulang, atau hanya berpindahnya kepemilikan konsesi bagi kebijakan pencabutan izin. Tidak menjadi penyelesaian bagi konflik agraria juga permasalahan sosial dan lingkungan.

Apakah agenda dibalik kedua manuver tersebut? dan apa jalan terbaik bagi Indonesia untuk segera bertransisi ke energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan?

Narasumber

Narasumber diharapkan memaparkan pandangannya dalam waktu 10 menit (dengan toleransi 5 menit), untuk kemudian berdiskusi bersama para jurnalis atau publik dengan dipandu moderator.

Agenda	Narasumber	Waktu
Pembukaan	Moderator: Widia Primastika, Trend Asia	5'
Paparan Narasumber	Melky Nahar, JATAM: Dampak KPC, PKP2B, dan apa yang harus dilakukan terhadapnya.	10' (toleransi 5 menit)
Paparan Narasumber	Erwin F. Syuhada, FRI Kutim: Temuan dan situasi lapangan terkait KPC (aktivitas illegal setelah izin habis)	10' (toleransi 5 menit)
Paparan Narasumber	Dr. Haris Retno, Akademisi Universitas Mulawarman: Kontroversi perpanjangan izin PT KPC, termasuk perpanjangan janggal 14 hari dari sudut pandang hukum.	10' (toleransi 5 menit)
Paparan Narasumber	Aryanto Nugroho, PWYP: Stop Export, DMO, dan Pencabutan Izin IUP dari sudut pandang tata kelola pertambangan dan transisi energi	10' (toleransi 5 menit)
Paparan Narasumber	Binbin Mariana, Market Forces: KPC, PKP2B dan Status Pendanaan mereka, dan transisi energi	10' (toleransi 5 menit)
Diskusi, Tanya Jawab	Dipandu Moderator	20'
Closing Statement	Dipandu Moderator	10'
Penutupan	Moderator	5'